

Analisis Kebijakan Blue Economy di Indonesia

Muhamad Faisal Abdul Latif¹, Salma Nur'aina Wafa², Siti Alia

¹UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

³UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

How to cite: Abdul Latif, M. F., & Wafa, S. N. (2023). *Analisis kebijakan blue economy di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(2). 95-106

Histori Artikel

Dikirim: 1 Oktober 2023

Diterima: 18 Desember 2023

Keywords:

Blue Economy, Marine Sector

Kata Kunci:

Ekonomi Biru, Sektor Kelautan

ABSTRACT

This study aims to examine the policy implementation of the blue economy in Indonesia and its challenges. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through literature studies using the PRISMA method and the Directory of Open Access Journals (DOAJ) database. Indonesia focuses on the concept of the blue economy through marine-based economic policies. The study's results indicate that the implementation of the blue economy model in Indonesia is more focused on the fisheries industry, emphasizing sustainable marine infrastructure development and the management of marine resources based on natural efficiency and zero waste principles. However, the implementation of the blue economy also faces various challenges, such as marine ecosystem damage due to unsustainable economic activities, conflicts between the fisheries and maritime tourism sectors, unclear or overlapping policies, technological limitations, and insufficient funding. Comprehensive policies, investment in marine technology research, and partnerships between the government, private sector, and international community are needed to support the sustainable growth of the blue economy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan implementasi blue economy di Indonesia beserta tantangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan menggunakan metode PRISMA dan database Directory of Open Access Journals (DOAJ). Indonesia memfokuskan konsep blue economy melalui kebijakan ekonomi berbasis kelautan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model ekonomi biru di Indonesia lebih terfokus pada industri perikanan, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur kelautan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya laut dengan prinsip efisiensi alam dan zero waste. Namun, implementasi blue economy juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan, konflik antara sektor perikanan dan pariwisata bahari, kebijakan yang belum jelas atau tumpang tindih, keterbatasan teknologi, dan kurangnya pendanaan. Diperlukan kebijakan yang komprehensif, investasi dalam penelitian teknologi kelautan, serta kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional untuk mendukung pertumbuhan blue economy secara berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Letak strategis Indonesia di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Pasifik, menjadikan wilayah lautnya sebagai jalur pelayaran yang sangat penting bagi masyarakat internasional. Wilayah perairan Indonesia

Email : alifyaassya4@gmail.com, cahyaftlhlyt15@gmail.com, ranifadhillah.1207@gmail.com

tidak hanya berfungsi sebagai rute utama bagi perdagangan global tetapi juga sebagai jalur vital bagi hubungan politik, militer, dan kebudayaan antara berbagai negara dan benua. Samudera Hindia, sebagai salah satu titik perlintasan utama, telah lama memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah maritim dunia. Sejak zaman kuno, samudera ini telah menjadi jalur utama yang menghubungkan benua

Asia, Afrika, dan Eropa. Melalui jalur ini, barang-barang dagangan seperti rempah-rempah, sutra, dan komoditas lainnya diperdagangkan secara luas, memungkinkan terjadinya pertukaran ekonomi yang signifikan antara berbagai peradaban. Dalam konteks modern, peran vital Samudera Hindia dan perairan Indonesia ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan konsep ekonomi biru atau *blue economy*.

Blue economy atau ekonomi biru telah menarik perhatian global karena perannya yang besar dalam menopang dan memperkaya perekonomian dunia. *Blue economy* adalah konsep yang mendukung *green economy* yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan serta mendorong pengembangan ekonomi yang rendah karbon. Konsep ini menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Rianawati, et al., 2024). *Blue economy* bertujuan untuk memastikan kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir serta laut yang sangat berkaitan dengan pengembangan ekonomi industri kelautan. Ini mencakup nelayan, pengolahan ikan, budidaya perikanan, eksportir hasil laut, dan sektor ekowisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan (Sunarlan & Kusnadi, 2018). Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata bahari, energi laut, dan bioteknologi laut.

Sejak 2012, *blue economy* telah memasuki tahap praktik dan eksplorasi. Berbagai negara dan kawasan telah menyusun kerangka kerja strategis dan rencana aksi untuk mengembangkan ekonomi biru (Wenhai et al., 2019). Setelah lima tahun menerapkan strategi pertumbuhan biru, pada tahun 2017, Uni Eropa menerbitkan laporan yang mengevaluasi pelajaran yang telah diperoleh dan pencapaian sejak 2012, saat konsep ekonomi biru pertama kali muncul (Patil et al., 2018). Laporan tersebut menjelaskan lima aspek utama, yaitu: (i) dorongan pertumbuhan di lima area fokus, pesisternas energi biru, akuakultur, pariwisata pesisir dan bahari, bioteknologi biru, serta sumber daya mineral dasar laut, (ii) manfaat data kelautan, perencanaan tata ruang, dan pengawasan maritim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru, (iii) promosi pendekatan kemitraan, (iv) peningkatan investasi, dan (v) pengembangan strategi pertumbuhan biru yang sesuai dengan tantangan masa depan (Wenhai et al., 2019).

Prinsip *blue economy* adalah menggunakan sumber daya alam dan teknologi secara berkelanjutan, dengan fokus utama pada pelestarian lingkungan. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dan konsumsi melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan inovatif (Burgess 2018). Dengan pendekatan ini, *blue economy* berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak mengorbankan kesehatan ekosistem. Selain itu, prinsip ini juga berusaha meminimalkan risiko lingkungan, seperti polusi dan kerusakan habitat, sehingga dapat mencapai keseimbangan yang harmonis antara alam dan manusia. Melalui ekonomi biru, diharapkan tercipta suatu sistem ekonomi yang tidak hanya produktif dan menguntungkan, tetapi juga bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip

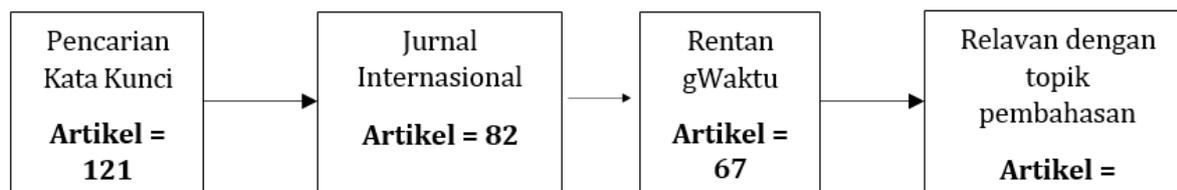
ekonomi biru dalam pengelolaan wilayah lautnya, Indonesia dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak merusak lingkungan, tetapi justru memperkuat kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional dapat ditingkatkan melalui kebijakan dan praktik ekonomi biru yang inovatif dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional dan global, serta bagi kelestarian lingkungan laut.

Wen Hai, dkk (2019) mengulas secara menyeluruh tentang blue economy serta tantangannya, dan menemukan bahwa ekosistem laut dapat memberikan berbagai manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial (Wenhai, et al., 2019). Namun, di balik potensinya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan memperluas sektor-sektor industri seperti perikanan, pariwisata, dan energi laut, blue economy juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Sumber daya kelautan harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutannya, mengingat ancaman seperti overfishing, pencemaran laut, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, konsep blue economy tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada perlindungan ekosistem laut dan pesisir, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Untuk mencapai ekonomi biru yang berkelanjutan, setiap negara perlu menemukan cara terbaik untuk menyeimbangkan antara keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Ini bertujuan agar penggunaan sumber daya maritim dapat dioptimalkan, sambil memastikan manfaat maksimal bagi lingkungan (Olteanu & Stinga, 2019).

B. METODE PENELITIAN

Tinjauan literatur ini hanya memusatkan perhatian pada variabel independen. Penelitian akan meneliti determinan Blue Economy di Indonesia. Kriteria inklusi mencakup artikel lengkap yang relevan dan studi kasus yang berlokasi di Indonesia. Artikel yang dipilih melalui proses penyaringan dari database Directory of Open Access Journals (DIAJAK) kemudian dianalisis dengan membaca seluruh teks, terutama pada bagian hasil, untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi Blue Economy.

Tinjauan literatur ini menggunakan metode PRISMA. Jurnal penelitian tahun 2024 dengan desain penelitian analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji informasi dari 122 artikel yang ditelusuri melalui internet untuk memperkuat argumen dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan database jurnal yaitu Directory of Open Access Journals (DOAJ). DOAJ digunakan sebagai pengelola referensi, dimulai dengan membuka aplikasi DOAJ, kemudian mengetik judul artikel yang relevan dan mengklik cari. Di database DOAJ, cukup mengetik judul artikel yang



relevan dan mencari.

Gambar 1. Karakteristik Artikel

Kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yaitu artikel harus relevan dengan topik, tersedia dalam teks lengkap, dan berhubungan dengan determinan Blue Economy di Indonesia. Rentang tahun publikasi yang dipertimbangkan adalah Januari 2017 hingga Desember 2024. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti determinan Blue Economy, potensi ekonomi sektor kelautan, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan tantangan dalam implementasi Blue Economy. Setiap artikel ditinjau terlebih dahulu, kemudian artikel yang relevan diunduh dan disalin menjadi satu file di laptop. Dari hasil pencarian, ditemukan beberapa artikel yang dianggap relevan (Gambar 1).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Blue Economy

Menurut (Prayuda & Sary, 2019) Blue Economy merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk mengintegrasikan penggunaan berkelanjutan sumber daya laut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Dalam penelitian lain seperti penelitian yang dilakukan oleh (Erianto dkk., 2024) Konsep ini menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya laut secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aka nada sebuah keberlanjutan di masa depan. Aspek utama dari Blue Economy meliputi perikanan berkelanjutan, di mana pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan dengan metode yang tidak merusak ekosistem laut dan menjaga keseimbangan populasi ikan, yang penting untuk memastikan pasokan ikan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Pariwisata bahari, yang memanfaatkan keindahan dan keunikan ekosistem laut seperti terumbu karang, pantai, dan kehidupan laut lainnya, juga menjadi bagian penting (Febryaningrum dkk., 2024). Pariwisata bahari yang berkelanjutan menjamin bahwa aktivitas wisata tidak merusak lingkungan laut dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Selain itu, pemanfaatan sumber energi terbarukan dari laut, seperti energi gelombang, energi pasang surut, dan energi angin lepas pantai, tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap upaya global dalam mitigasi perubahan iklim (Ma'ruf, 2023).

Pariwisata bahari yang berkelanjutan menjamin bahwa aktivitas wisata tidak merusak ekosistem laut dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal. Selain itu, pemanfaatan sumber energi terbarukan dari laut, seperti energi gelombang, energi pasang surut, dan energi angin lepas pantai, tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Bioteknologi kelautan, yang menggunakan organisme laut untuk mengembangkan produk dan teknologi baru seperti obat-obatan, bahan pangan, dan material industri, memiliki potensi besar untuk inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan mendukung perekonomian. Selain itu, transportasi maritim yang efisien dan ramah lingkungan juga memainkan peran penting dalam perdagangan global dan mobilitas, serta mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pelayaran. Blue Economy bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan laut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pemanfaatan sumber daya laut, Blue Economy dapat mendukung pembangunan yang inklusif, yaitu pembangunan yang melibatkan dan memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, serta berkelanjutan, yaitu pembangunan

yang tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Wibowo dkk., 2021). Maka dari itu, dengan mengimplementasikan Blue Economy dapat diharapkan ekonomi dapat tumbuh tanpa mengganggu kelestarian ekosistem laut, sehingga manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini dan di masa depan.

B. Potensi dan Tantangan Blue Economy

Blue Economy memiliki potensi besar dalam berbagai aspek. Pertama, sektor kelautan dan perikanan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru, khususnya di negara-negara pesisir, yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kedua, pengembangan teknologi baru dalam pemanfaatan sumber daya laut, seperti energi terbarukan dari laut dan bioteknologi kelautan, menawarkan peluang inovasi yang signifikan (Wiratma & Nurgiyanti, 2019). Teknologi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam eksploitasi sumber daya laut (Adnan dkk., 2023). Ketiga, Blue Economy dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan menyediakan sumber pendapatan yang berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan dari sektor-sektor ekonomi berbasis laut (Febryaningrum dkk., 2024). Keempat, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional, dengan sektor-sektor seperti perikanan, pariwisata bahari, dan transportasi maritim menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Nasution, 2022). Terakhir, dengan pendekatan yang berkelanjutan, Blue Economy berupaya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, yang penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh tidak mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada lingkungan laut (Buana dkk., 2024).

Namun, implementasi Blue Economy juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi laut, dan eksploitasi berlebihan sumber daya laut yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut (Ferre & Rumansara, 2023). Kedua, persaingan dalam pemanfaatan sumber daya laut antara berbagai sektor dapat menimbulkan konflik, seperti antara sektor perikanan dan pariwisata bahari jika tidak ada pengelolaan yang baik (Basri, 2021). Ketiga, kebijakan dan regulasi yang belum jelas atau tumpang tindih dapat menghambat pengembangan Blue Economy, sehingga diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mendukung pengembangan Blue Economy yang berkelanjutan (Khalidun, 2017). Keempat, keterbatasan teknologi dalam eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya laut dapat menjadi hambatan dalam pengembangan Blue Economy, sehingga investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi kelautan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini (Prayuda & Sary, 2019). Terakhir, pengembangan Blue Economy membutuhkan investasi yang signifikan, namun kurangnya pendanaan dan investasi dalam sektor-sektor ekonomi berbasis laut dapat menghambat pertumbuhan Blue Economy. Oleh karena itu, diperlukan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional untuk mendukung investasi dalam Blue Economy (Bahri, S. E.M.E & Aprilianti, SSTP M.E, 2023).

C. Kebijakan dan Strategi Implementasi Blue Economy

Blue Economy atau Ekonomi Biru merupakan konsep baru dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dengan lautan yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, konsep Ekonomi Biru ini sangat cocok diterapkan dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi di sektor perikanan dan kelautan di Indonesia (Nurhayati & Putri, 2013). Indonesia berfokus pada pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan dengan mengadopsi konsep ekonomi biru sebagai dasar kebijakan kelautannya (Sutardjo, 2012). Ekonomi biru berfokus pada tiga pilar utama: keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial (Techera E, Winter G, 2019). Pilar keberlanjutan lingkungan mencakup upaya pelestarian ekosistem laut dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pilar ekonomi menitikberatkan pada pengembangan industri kelautan yang efisien dan menguntungkan, sementara pilar sosial berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebar merata di

seluruh komunitas. Konsep ekonomi biru bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir serta laut, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan dan perikanan. Ini mencakup pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, inovasi dalam teknologi perikanan, pengelolaan pariwisata bahari yang ramah lingkungan, serta pengembangan energi terbarukan dari laut. Bagi Indonesia, sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, penerapan konsep ekonomi biru sangat relevan (Prayuda & Sary, 2019). Ini tidak hanya akan memperkuat sektor ekonomi kelautan, tetapi juga melindungi ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat juga lingkungan. Konsep blue economy ini memberikan penjelasan bahwa pembangunan di wilayah pesisir harus bertumpu pada kekuatan dan potensi wilayah tersebut. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah di wilayah pesisir yang dapat dipadukan dengan kondisi wilayah pesisir adalah dengan mengembangkan industri yang berbasis pada potensi perikanan dan perairan masyarakat di wilayah pesisir. Sehingga pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis pada pengembangan ekonomi mikro dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya mengembangkan blue economy, Indonesia bersama UNDP menyusun konsep Blue Economy Development Index (BEDI). BEDI merupakan metode evaluasi holistik yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan pengelolaan sumber daya laut dalam penerapan blue economy. Konsep BEDI membawa berbagai manfaat bagi pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan, antara lain: pertama, mengukur potensi sumber daya kelautan untuk memastikan pemanfaatannya secara optimal; kedua, memahami peluang dan tantangan dalam pengelolaan kelautan, sehingga dapat dibuat strategi yang lebih efektif dan efisien; dan ketiga, mengukur manfaat sosial dari penerapan blue economy, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, BEDI menjadi alat penting dalam upaya menciptakan pembangunan kelautan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia (Adrianto, dkk., 2019).

Di era pemerintahan Joko Widodo, penerapan model blue economy di Indonesia lebih terfokus pada industri perikanan. Blue economy, yang menjadi landasan bagi pola pembangunan ekonomi kelautan, menitikberatkan pada ekonomi berbasis laut (ocean-based economy) yang secara umum berfokus pada pembangunan infrastruktur kelautan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber

daya laut yang tidak berlebihan. Model pendekatan ini menguntungkan Indonesia dalam mendukung pembangunan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Penerapan konsep ini di Indonesia didasarkan pada dua prinsip fundamental Blue Economy, yaitu efisiensi alam (*nature's efficiency*) dan zero waste. Konsep Blue Economy didasarkan pada dua prinsip utama yang saling melengkapi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Efisiensi Alam (*Nature's Efficiency*) adalah prinsip yang menekankan pentingnya menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan siklus produksi ekosistem alam. Tujuannya adalah untuk memperkaya sumber daya alam yang ada, mengurangi eksploitasi berlebihan, dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya tidak merusak keseimbangan ekologis. Dengan meniru cara alam bekerja, Blue Economy berusaha menciptakan proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sedangkan Zero Waste adalah prinsip yang mendorong pengolahan limbah atau sampah dari suatu sumber daya agar bisa diubah menjadi bahan yang bermanfaat. Dengan mengolah kembali limbah, Blue Economy tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan tetapi juga menciptakan nilai tambah dari bahan yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Pendekatan ini

membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mendukung keberlanjutan ekosistem dengan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia. Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, Blue Economy berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang (Rani & Cahyasari, 2015; Sari & Muslimah, 2020). Selanjutnya, penerapan Blue Economy tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan tetapi juga pada pemanfaatan teknologi secara optimal. Teknologi memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor kelautan. Penggunaan teknologi canggih memungkinkan diversifikasi produk, sehingga industri kelautan dapat menghasilkan berbagai produk bernilai tambah. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku untuk produksi baru, mendukung prinsip zero waste dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan demikian, teknologi berkontribusi signifikan dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Sari & Muslimah, 2020).

Adapun konsep "ecoport" yang diterapkan berdasarkan model blue economy digunakan untuk meningkatkan industri perikanan. Konsep ecoport sangat membantu masyarakat nelayan dalam berbagai aspek, terutama dalam mengolah pemasaran hasil tangkapan secara higienis. Ecoport menyediakan fasilitas yang memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pengumpulan hasil tangkapan hingga penyimpanan, pembersihan, pembuatan fillet, dan pengemasan ikan, dilakukan sesuai dengan standar kebersihan yang tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk perikanan tetapi juga meningkatkan nilai jualnya di pasar. Selain itu, ecoport juga memberikan solusi untuk pengelolaan limbah perikanan. Limbah ikan dan udang yang biasanya dibuang dan mencemari lingkungan kini dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Limbah tersebut bisa diolah menjadi produk bernilai tambah seperti pupuk organik, pakan ternak, atau bahkan bahan baku untuk industri lainnya. Dengan cara ini, konsep ecoport tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat nelayan. Pengembangan ekonomi biru dengan konsep ecoport sangat relevan dan dapat diterapkan di Indonesia, mengingat negara ini memiliki garis

pantai yang panjang dan komunitas nelayan yang besar. Implementasi ecoport di berbagai pelabuhan perikanan di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor perikanan, memberikan manfaat ekonomi langsung bagi nelayan, dan menjaga kelestarian lingkungan laut.

Pada tahun 2020, pemerintah secara efektif menghentikan penangkapan ikan berlebihan dan praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom yang merusak terumbu karang. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati. Selain itu, pemerintah juga menerapkan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memulihkan stok ikan secepat mungkin dan mencapai produksi berkelanjutan maksimum sesuai dengan karakteristik biologisnya. Langkah ini memastikan bahwa praktik penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pada tahun yang sama, pemerintah juga melindungi dan melestarikan setidaknya 10 persen wilayah pesisir dan laut, sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan laut yang penting untuk keberlanjutan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat pribadtr yang bergantung pada sumber daya laut. Menjelang tahun 2025, pemerintah menargetkan pencegahan dan pengurangan semua jenis pencemaran lingkungan, terutama di laut, secara

signifikan. Fokus utama dari inisiatif ini adalah mengurangi sampah laut dan polusi nutrisi yang berdampak buruk pada laut dan sumber daya di dalamnya. Upaya ini termasuk kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan sistem pengelolaan limbah, dan mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi run-off nutrisi yang mengalir ke laut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan laut, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh Bappenas pada tahun 2020.

Konsep Blue Economy dalam manajemen perikanan memerlukan integrasi harmonis dari lima sektor utama. Pertama adalah Inovasi dan Teknologi. Tujuannya adalah mengelola perikanan dengan teknik-teknik yang lebih efisien untuk meningkatkan produksi. Hal ini sejalan dengan prinsip Blue Economy yang menekankan pengelolaan perikanan yang memperhatikan dan menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan. Kedua, Keberlanjutan Ekosistem dan Lingkungan. Pembangunan infrastruktur di pesisir harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Semua tindakan yang berpotensi mengancam kestabilan laut harus digantikan dengan praktik ramah lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, Penyelesaian antara Nelayan dengan Petani Ikan. Pengembangan ekonomi melalui Blue Economy tidak hanya ditujukan untuk peningkatan ekonomi makro tetapi juga ekonomi mikro, seperti perekonomian nelayan dan petani ikan. Mereka tidak hanya dilatih untuk menangkap, membudidayakan, dan menjual ikan, tetapi juga diajarkan teknik inovatif untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, Kebijakan Pemerintah. Untuk mewujudkan konsep Blue Economy, diperlukan kebijakan dari pemerintah yang mengatur pengelolaan perikanan dengan regulasi yang jelas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi dampak negatif terhadap biota dan ekosistem laut. Kelima, Penelitian dan Pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan teknik inovatif yang sesuai dengan prinsip Blue Economy. Hasil dari kegiatan ini akan lebih bermanfaat

jika dilakukan secara terbuka, sehingga nelayan dan petani ikan dapat menerapkan teknik-teknik inovatif untuk meningkatkan perekonomian mereka sekaligus melestarikan ekosistem dan lingkungan (Sari & Muslimah, 2020).

D. Pengaruh Evaluasi Implementasi Blue Economy di Beberapa Negara

Beberapa negara telah mengimplementasikan konsep Blue Economy dengan berbagai tingkat keberhasilan (Sukarniati & Khoirudin, 2017). Konsep ini menekankan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesehatan ekosistem laut (Darajati, 2024). Keberhasilan implementasi Blue Economy sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, serta partisipasi berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut (Rahman & Prakoso, 2024).

Seychelles merupakan salah satu contoh negara yang berhasil menerapkan Blue Economy, negara kepulauan ini telah mengembangkan sektor pariwisata bahari dan perikanan berkelanjutan secara signifikan (M. N. K. Putra & Asri, 2023). Pariwisata bahari di Seychelles tidak hanya menarik wisatawan internasional tetapi juga mendukung perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, perikanan berkelanjutan di Seychelles memastikan bahwa eksploitasi sumber daya ikan dilakukan dengan cara yang tidak merusak ekosistem laut, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara tersebut (Nizmi & Zebua, 2015).

Sedangkan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Blue Economy (Alifa & Zahidi, 2024). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang kaya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan Blue Economy (Endro, 2018). Namun, masalah regulasi yang belum terkoordinasi dengan baik, kurangnya investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan konflik kepentingan antar sektor yang memanfaatkan sumber daya laut menjadi hambatan utama. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi Blue Economy yang efektif dan berkelanjutan (A. Putra, 2024).

Tantangan lainnya yang menghambat penerapan blue economy dalam penerapan Blue Economy di Indonesia seperti polusi laut dan perubahan iklim (Supriyadi dkk., 2022). Adapun bentuk dari Polusi laut yang menghambat penerapan blue economy adalah sampah plastik dan limbah industry yang mengancam kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya laut (Ahadin, 2020). Sedangkan hambatan yang dipengaruhi oleh Perubahan iklim adalah naiknya permukaan air laut dan perubahan suhu air yang berdampak negatif pada ekosistem laut (Agustina dkk., 2023). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah lingkungan ini guna mendukung implementasi Blue Economy di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah penting yang harus diambil Indonesia adalah dengan membuat atau menetapkan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan laut, serta kerjasama internasional dalam mengelola sumber daya laut (Hidayat dkk., 2024). Dengan demikian, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi Blue Economy untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga kelestarian ekosistem laut untuk generasi mendatang.

D. SIMPULAN

Blue Economy merupakan konsep yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan konsep ini. Namun, untuk memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal, diperlukan kajian mendalam mengenai determinan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Blue Economy. Blue Economy memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inovasi teknologi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti kerusakan ekosistem laut, konflik pemanfaatan sumber daya, kebijakan yang belum jelas, keterbatasan teknologi, dan kurangnya investasi.

Beberapa negara, telah berhasil menerapkan Blue Economy dengan memanfaatkan pariwisata bahari dan perikanan berkelanjutan. Indonesia perlu mengatasi tantangan regulasi, investasi, dan konflik kepentingan antar sektor untuk memastikan implementasi Blue Economy yang efektif. Langkah-langkah konkret yang diperlukan meliputi kebijakan yang lebih terkoordinasi, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama internasional. Dengan mengimplementasikan Blue Economy secara efektif, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi lautnya untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga kelestarian ekosistem laut untuk generasi mendatang. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori dan literatur mengenai Blue Economy tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas.

REFERENSI

- Adnan, A. D. I., Hasana, S., & Assidiq, F. M. (2023). Implementasi blue economy di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi big data. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 134–140.
- Adrianto, L., dkk. (2019). *Blue Economy Development Index: A Conceptual Framework*.
- Agustina, N. A., Prasita, V. D., Kusuma, A., & Rosana, N. (2023). *Pemanfaatan sumberdaya lahan pesisir berbasis daya dukung lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim global*. Hang Tuah University Press.
- Ahadin, M. (2020). *Kepentingan Pemerintah Indonesia mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dalam kerja sama Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2015-2019* [Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta].
- Alifa, N. N., & Zahidi, M. S. (2024). Pengembangan ekonomi biru sebagai strategi Indonesia menuju ekonomi maju. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 38(1), Article 1.
- Bahri, S. E. M. E., D. Z., & Aprilianti, S. S. T. P. M. E., D. V. (2023). *Menuju kesejahteraan berkelanjutan: Pemahaman terhadap pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, Islam, green economy, dan blue economy*. Nas Media Pustaka.
- Basri, H. (2021). Pengelolaan, pengawasan kawasan pesisir dan laut di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), Article 2.
- Buana, A. V., Ayu, N., & Pandin, M. Y. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip blue economy dan dampak pada masyarakat di wilayah pesisir

- Kenjeran Surabaya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 1(4), 1–12.
- Darajati, M. R. (2024). Urgensi implementasi konsep ekonomi biru dalam tata kelola sektor kelautan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(1), Article 1.
- Endro. (2018). Deskripsi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terkait dengan potensi pertahanan berdasarkan keunggulan geostrategis dan blue economy. In *Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Pekalongan Ke-37* (pp. 45–64).
- Erianto, R., Hasibuan, I. M., & Batubara, M. (2024). Blue economy perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), Article 01.
- Febryaningrum, V., Mayangsari, S., & Pandin, M. Y. R. (2024). Peran ekonomi biru dalam memperkuat ketahanan ekonomi: Studi kasus kawasan wisata mangrove di Surabaya. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 67–84.
- Ferre, G. S., & Rumansara, J. Y. (2023). Mendesak peran aktif gereja merawat ekosistem laut: Sebuah pelajaran penting dari masyarakat Marao Biak. *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 6(2), Article 2.
- Gusrah, Anwar, & Parawansa. (2024). Implementasi skema ekonomi biru dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea: Kajian keberlanjutan sumber daya perikanan di pesisir Sulawesi Selatan.
- Hidayat, S. K., Sundari, S., & Pakpahan, M. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: Tantangan dan peluang untuk masa depan. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 104–117.
- Khaldun, R. I. (2017). Strategi kebijakan peningkatan daya saing rumput laut Indonesia di pasar global. *Sospol*, 3(1), Article 1.
- Ma'ruf, F. (2023). Peluang pariwisata Karimunjawa dalam perspektif. *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 11(3).
- Maulani, S. F., Tsani, R. R., Tinambunan, R. C. H., & Mauluddin, F. M. (2022). Trends of blue economic study research: One-decade systematic review. *Eqien – Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(03), Article 03.
- Nasution, M. (2022). The potential and challenges of the blue economy in supporting economic growth in Indonesia: Literature review. *Jurnal Budget*, 7(2).
- Nizmi, Y. E., & Zebua, R. E. (2015). Kerjasama pengembangan pariwisata Kepulauan Nias dengan Republik Seychelles melalui Nias Strategic Development Partnership (NSDP) (Nomor 2) [eArticle]. Riau University.
- Nurhayati, S., & Putri, F. H. (2013). Blue and economy policy and their impact to Indonesian community welfare. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12.
- Olteanu, A., & Stinga, V. (2019). The economic impact of the blue economy. *Lumen Proceedings*, 7(1).
- Polanunu, A., & Demeiati, N. K. (2022). Indonesia sebagai middle power: Strategi niche diplomacy dalam manifestasi pembangunan kelautan berkelanjutan berbasis blue economy. *Padjajaran Journal of International Relations*, 4(2).
- Prayuda, R., & Sary, D. V. (2019). Strategi Indonesia dalam implementasi konsep blue economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi ASEAN. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2).
- Putra, A. (2024). Optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
- Putra, M. N. K., & Asri, M. F. (2023). Juridical review of blue economy in Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 3(1), Article 1.

- Rahman, A., & Prakoso, L. Y. (2024). Strategi ekonomi pertahanan maritim dengan penerapan blue economy. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4), Article 4.
- Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia dalam menerapkan model kebijakan blue economy masa pemerintahan Joko Widodo. *Transnasional*, 7(1).
- Rianawati, A., dkk. (2024). Enhancement of Indonesia's blue economy sector through innovation and competitive advantage based on resource-based view theory. *Journal Problems and Perspectives in Management*, 22(2).
- Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (2020). Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 423, Issue 1).
- Sukarniati, L., & Khoirudin, R. (2017). Analisis kelembagaan penerapan konsep blue economy pada tambak udang (studi kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Sronjakan Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), Article 2.
- Sunarlan, S., & Kusnadi, K. (2018). Sinergi perikanan laut dan sektor ekowisata sebagai solusi penanggulangan kemiskinan nelayan. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 31(2).
- Supriyadi, A. A., Alman, G. C., Rianto, R., Juliana, J., Rahmayanti, S., Yusuf, M. A., Ariani, R. A., Danga, C. M., Avisha, F., Prakoso, L. Y., Sutrasna, Y., & Sulistyadi, E. (2022). Kebijakan ekonomi ketahanan pangan dengan strategi blue economy menghadapi ancaman perubahan iklim. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(4), Article 4.
- Sutardjo, S. C. (2012). *Kebijakan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Techera, E., & Winter, G. (2019). *Marine extremes: Ocean safety, marine health and the blue economy*. Routledge.
- Wahyuddin, Y. A., Raka, M. H., & Tri Ridho. (2022). Strategi kebijakan blue economy Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan pada era Joko Widodo. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2).
- Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., Xiaofan, Z., Levin, L., Escobar, E., Amon, D., Yue, Y., Reitz, A., Neves, A. A. S., O'Rourke, E., Mannarini, G., Pearlman, J., Tinker, J., Horsburgh, K. J., Lehodey, P., ... Yufeng, Y. (2019). Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives. *Frontiers in Marine Science*, 6(261).
- Wibowo, A., Prabawa, E., & Sugiarto, E. (2021). Manajemen strategi pengelolaan sumber daya maritim di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), Article 2.
- Wiratma, H. D., & Nurgiyanti, T. (2019). Pembangunan pariwisata Kulon Progo melalui konsep green economy dan blue economy. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(2), Article 2.